



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA **2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	4
I.2.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan.	4
I.2.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan.....	4
I.3. Landasan Hukum	5
I.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	11
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB IV. PENUTUP	iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	20
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	
Tabel 3.1	32
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui evaluasi kinerja serta penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berperan penting untuk mendorong kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, kondisi

keuangan daerah serta kondisi lain yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, sesuai Urusan yang diampu, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dan mengacu pada RKPD;
- b. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif;
- c. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas perubahan renja Dinas Perhubungan tahun 2024 sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan dokumen Rancangan RKPD Perubahan yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran, rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

Berdasarkan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD Perubahan. Rancangan akhir RKPD Perubahan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD. Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD Perubahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi. Rancangan Perkada tentang RKPD Perubahan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan. Penyusunan rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan ditetapkan. Rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan ditetapkan. Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Perubahan. Dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2024.

I.2. Maksud dan Tujuan

I.2.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan adalah :

1. Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R APBD-P) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2024.
2. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Perhubungan jangka pendek (1 tahun).
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Perhubungan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan.

I.2.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan adalah :

1. Mewujudkan sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan dalam jangka 1 tahun.

Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan rencana anggaran Dinas Perhubungan.

I.3 Landasan Hukum

1. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2024 meliputi :
 - 1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4) Undang - Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 No.43, Tambahan Lembaran Negara No. 6801);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (jdih.dephub.go.id);
- 11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota (jdih.dephub.go.id);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
- 15) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1,15,5 - 1317 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmendagri 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 20) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 21) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 52 Seri E)
- 22) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17);
- 23) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
- 24) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);

- 25) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5);
 - 26) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81);
 - 27) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 130).
 - 28) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 42).
2. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Perhubungan
- 1) Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
 - (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf I adalah Dinas Perhubungan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
 - 2) Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya selanjutnya terinci sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Prasarana Transportasi;
 - d. Bidang Lalu Lintas;
 - e. Bidang Angkutan;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - g. UPTD Pengelolaan Transportasi Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- 4) Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat / menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pencapaian indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2021 – 2026 pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini memuat perubahan yang dapat terjadi pada Rencana Kerja Perubahan karena alasan tertentu dan narasi terkait dukungan semua pihak dalam pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2024 dilaksanakan dalam 4 (empat) program yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, dan Program Pengelolaan Perkeretaapian. Program – program tersebut diwujudkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun 2024 sampai dengan triwulan II dijabarkan secara lengkap pada tabel 2.1 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diukur dengan indikator Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan dengan target 92%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan II sebesar 94,12%. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 akan dapat tercapai dengan asumsi bahwa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor telah terpenuhi dengan baik. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 100%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target output 100% dan anggaran Rp. 55.876.664.422. Realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 100% karena Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN selalu dapat diberikan setiap bulannya dan penyerapan anggaran Rp. 41.234.554.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 100% dan anggaran 56.45% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dengan target 100%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diukur dengan indikator Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dengan target output 100% dan anggaran Rp. 6.729.789.704. Realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 100% karena ketersediaan barang dan jasa perkantoran selalu dapat terpenuhi setiap bulannya dan penyerapan anggaran Rp. 2.143.978.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 100% dan anggaran 36,04% dimana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran lebih dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target 100%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diukur dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target output 100% dan anggaran Rp. 9.210.268.343. Realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 100% karena pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selalu dapat terpenuhi setiap bulannya dan penyerapan anggaran Rp. 6.208.567.000.

Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 100% dan anggaran 42,16% dimana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran lebih dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

d. Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan peningkatan pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum dengan target 12 laporan dan indikator Jumlah laporan peningkatan pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum dengan target 12 laporan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD BLUD Pengelolaan Transportasi Umum) dengan indikator Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dengan target 1 unit kerja dan anggaran Rp. 6.684.000.000. Realisasi output sampai dengan triwulan II sebesar 1 unit kerja dan penyerapan anggaran Rp. 2.040.535.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 100% dan anggaran 30,52% dimana capaian output ini kurang sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD BLUD Parkir Tepi Jalan Umum) dengan indikator Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dengan target 1 unit kerja dan anggaran Rp. 2.733.622.844. Realisasi output sampai dengan triwulan II sebesar 1 unit kerja dan penyerapan anggaran Rp. 759.148.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 100% dan anggaran 27,77% dimana capaian output ini kurang sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu :

- a. Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dengan target 48,70%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 51,23%. sehingga Capaian indikator program sebesar 105,09%;
- b. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota dengan target 45 km/jam. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 43,29 km/jam. Sehingga Capaian indikator program sebesar 86,58%;
- c. Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya dengan target 80%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 92,12%. Sehingga Capaian indikator program sebesar 115,15%;
- d. Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya dengan target 80%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 81,51%. Sehingga capaian indikator program sebesar 101,89%.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya dengan target 15 Lokasi dengan realisasi sampai dengan triwulan II adalah 0 Lokasi dan Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya dengan target 31 Kawasan dengan realisasi sampai dengan triwulan II adalah 31 Kawasan. Untuk Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Prasarana Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun dengan target 3.000 unit dan anggaran Rp. 99.845.241.975, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 4.712 unit dan penyerapan anggaran Rp. 52.538.346.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 157,07% dan anggaran 44,81% di mana capaian output ini kurang sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sehingga Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran dan perubahan target output sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan target 2.500 unit dan anggaran Rp. 11.711.174.722, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 930 unit dan penyerapan anggaran Rp. 3.002.813.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 37,2% dan anggaran 10,47% di mana capaian output ini kurang sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target 9.000 unit dan anggaran Rp. 27.236.980.325, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 4.500 unit dan penyerapan anggaran Rp. 8.987.786.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 50% dan anggaran 25,58% dimana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan indikator Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target 99.252 unit dan anggaran Rp.135.319.097.069, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 105.846 unit dan penyerapan anggaran Rp. 98.428.889.000, Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 106,64% dan anggaran 69,09%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran dan perubahan target output sesuai dengan kebutuhan.

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan dengan target 14 lokasi dan realisasi target output kegiatan sebesar 14 lokasi, dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) dengan indikator Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara dengan target 12 unit dan anggaran Rp. 19.087.306.554, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 14 unit dan penyerapan anggaran Rp. 16.539.547.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 116,66% dan anggaran 57,02% dimana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran dan perubahan target output sesuai dengan kebutuhan.

c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan target 60 berkas dan realisasi target output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 39 berkas, dengan sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 12 laporan dan anggaran Rp.25.249.470.994, realisasi output sampai

dengan triwulan II adalah 6 laporan dan penyerapan anggaran Rp. 13.533.802.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 50% dan anggaran 66,59% dimana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR dengan target 134.525 unit dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 30.761 unit, dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target 33 unit dan anggaran Rp. 9.717.776.860, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 0 unit dan penyerapan anggaran Rp. 4.396.522.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 0% dan anggaran 54,01% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan target 7 Jenis dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 7 Jenis serta indikator Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target 10 Lokasi dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 4 Lokasi, dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target 13 Laporan dan anggaran Rp. 3.546.770.321, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 3 Laporan dan penyerapan anggaran Rp. 1.234.080.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 0% dan anggaran 29,71% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target

per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan target 12 laporan dan anggaran Rp. 32.044.292.582, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 6 laporan dan penyerapan anggaran Rp. 17.666.856.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 50% dan anggaran 55,13% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya dengan target 3 Koridor dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 8 Koridor serta indikator Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan dengan target 75 Orang dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 0 Orang, dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan target 2 laporan dan anggaran Rp. 50.743.530.587, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 1 Laporan dan penyerapan anggaran Rp. 1.199.546.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 50% dan anggaran 3,69% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

dengan target 72 unit dan anggaran Rp. 54.529.421.000, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 92 unit, penyerapan anggaran sebesar Rp.34.761.251.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 127,78% dan anggaran 63,74% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan I dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan dengan target 1 Jaringan dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 0 Jaringan, dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 10 dokumen dan anggaran Rp. 3.364.930.939, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 3 dokumen dan penyerapan anggaran Rp. 943.218.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 30% dan anggaran 18,53% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan dengan target 100%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan dengan target 2 Kali dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 2 Kali, dengan sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 2 Laporan dan anggaran Rp. 2.669.837.211, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 0 Laporan dan penyerapan anggaran Rp. 431.547.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 0% dan anggaran 12,26% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan II dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian dengan target 100%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian dengan target 2 Kali dan realisasi output kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 2 Kali, dengan sub kegiatan :

- 2) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian dengan indikator Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian dengan target 2 Dokumen dan anggaran Rp.5.274.311.892, realisasi output sampai dengan triwulan II adalah 0 Dokumen dan penyerapan anggaran Rp. 2.751.850.000. Capaian output sampai dengan triwulan II sebesar 0% dan anggaran 46,85% di mana capaian output ini telah sesuai dengan target per triwulan I dan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
2.15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																			
2.15.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			93,715,342		68,991,310		81,234,345		15,026,222		37,360,561	-	-		52,386,783		121,378,093		129,52%
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92 %		93.55 %		92 %		93.80 %		94.12 %		-	-		94.12 %		94.12 %		102.30%
2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73,040,321				55,876,664		12,361,648		28,872,906	-	-		41,234,554		41,234,554		56.45%
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	-		100 %		100 %		100.00 %
2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			35,732,522				55.876.664		12.361.648		28.872.906	-	-		41.234.554		41.234.554		115,40%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		272 Orang/ bulan		248 Orang/ bulan		256 Orang/ bulan		-	-		256 Orang/ bulan		256 Orang/ bulan		N/A
2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5,949,269				6,729,790		400,959		1,743,020	-	-		2,143,978		2,143,978		36.04%
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	-		100 %		100 %		100.00 %
2.15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2,354,427				6.729.790		400.959		1.743.020	-	-		2.143.978		2.143.978		91,06%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		23 Paket		4 Paket		12 Paket		-	-		12 Paket		12 Paket		N/A
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,725,751				9,210,268		2,046,136		4,162,431	-	-		6,208,567		6,208,567		42.16%
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	-		100 %		100 %		100.00 %
2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,518,840				9.210.268		2.046.136		4.162.431	-	-		6.208.567		6.208.567		246,49%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		-	-	3 Laporan		3 Laporan		N/A	
2.15.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				0				9,417,623		217,479		2,582,204	-	-		2,799,683		2,799,683		N/A
				Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
				Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
2.15.01.2.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			304,879,739				6.684.000		0		2.040.535	-	-		2.040.535		2.040.535		0.67%
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	N/A		N/A		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		-	-	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		N/A	
2.15.01.2.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			304,879,739				2.733.623		217.479		541.669	-	-		759.148		759.148		0.25%
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	N/A		N/A		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		-	-	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		N/A	
2.15.02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)				472,129,235		386,327,414		472,395,994		68,448,255		184,784,401	-	-		253,232,656		639,560,070		135,46%
				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perjanjian	48.75 %		50.40 %		48.70 %		52.79 %		51.23 %		-	-	51.23 %		51.23 %		105.09%	
				Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80 %		81.99 %		80 %		81.13 %		81.51 %		-	-	81.51 %		81.51 %		101.89%	
				Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80 %		80.98 %		80 %		91.73 %		92.12 %		-	-	92.12 %		92.12 %		115.15%	
				Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	50 km/jam		43.18 km/jam		45 km/jam		0.00 km/jam		43.29 km/jam		-	-	43.29 km/jam		43.29 km/jam		86.58%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
2.15.02.2.02			Penyediaan Perlungkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			323,533,151				274,112,494		42,219,192		120,738,641	-	-		162,957,834		162,957,834		50.37%
				Penyelenggaraan Perlungkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan	-	-		31 Kawasan		31 Kawasan		100.00 %	
				Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi		8 Lokasi		15 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi	-	-		0 Lokasi		8 Lokasi		53.33 %	
2.15.02.2.02.0001			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			117,251,786				99.845.242		8.982.349		43.555.997	-	-		52.538.346		52.538.346		44,81%
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	N/A		N/A		3000 Unit		3959 Unit		4712 Unit	-	-		4712 Unit		4712 Unit		N/A	
2.15.02.2.02.0002			Penyediaan Perlungkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			28,689,292				11.711.175		5.600		2.997.213	-	-		3.002.813		3.002.813		10,47%
				Jumlah Perlungkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A		N/A		2500 Unit		0 Unit		930 Unit	-	-		930 Unit		930 Unit		N/A	
2.15.02.2.02.0004			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlungkapan Jalan			35,134,102				27.236.980		1.341.698		7.646.088	-	-		8.987.786		8.987.786		25,58%
				Jumlah Perlungkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	N/A		N/A		9000 Unit		2250 Unit		4500 Unit	-	-		4500 Unit		4500 Unit		N/A	
2.15.02.2.02.0003			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			142,457,971				135.319.097		31.889.545		66.539.344	-	-		98.428.889		98.428.889		69,09%
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	N/A		N/A		99252 Unit		105846 Unit		105846 Unit	-	-		105846 Unit		105846 Unit		N/A	
2.15.02.2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			29,006,404				19,087,307		3,145,881		13,393,667	-	-		16,539,547		16,539,547		57.02%
				Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi		13 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi	-	-		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %	
2.15.02.2.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			29,006,404				19.087.307		3.145.881		13.393.667	-	-		16.539.547		16.539.547		57,02%
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	N/A		N/A		12 Unit		14 Unit		14 Unit	-	-		14 Unit		14 Unit		N/A	
2.15.02.2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan			20,323,724				25,249,471		4,540,539		8,993,263	-	-		13,533,802		13,533,802		66.59%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)				
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							K
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
		Fasilitas Parkir																					
				Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas		75 Berkas		60 Berkas		21 Berkas		39 Berkas		-	-	39 Berkas		114 Berkas		190.00 %		
2.15.02.2.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			20,323,724				25.249.471		4.540.539		8.993.263		-	-		13.533.802		13.533.802		66,59%
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A		
2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				8,140,371				9,717,777		1,260,920		3,135,602		-	-		4,396,522		4,396,522		54.01%
				Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit		123870 Unit		134525 Unit		30761 Unit		59435 Unit		-	-	59435 Unit		183305 Unit		136.26 %		
2.15.02.2.05.0001			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8,140,371				9.717.777		1.260.920		3.135.602		-	-		4.396.522		4.396.522		54,01%
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	N/A		N/A		33 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		N/A		
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				21,001,558				35,591,063		5,472,181		13,428,755		-	-		18,900,936		18,900,936		90.00%
				Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		9 Lokasi		10 Lokasi		2 Lokasi		4 Lokasi		-	-	4 Lokasi		13 Lokasi		130.00 %		
				Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		-	-	7 Jenis		7 Jenis		100.00 %		
2.15.02.2.06.0017			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4,153,675				3.546.770		168.759		1.065.321		-	-		1.234.080		1.234.080		29,71%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
				Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	N/A		N/A		13 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		-	-	3 Laporan		3 Laporan		N/A	
2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota				16,847,884			32.044.293		5.303.422		12.363.435		-	-	17.666.856		17.666.856		104,86%	
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				65,033,247			105,272,952		11,606,674		24,354,124		-	-	35,960,798		35,960,798		55.30%	
				Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		75 Orang		75 Orang		0 Orang		0 Orang		-	-	0 Orang		75 Orang		100.00 %	
				Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor		10 Koridor		3 Koridor		8 Koridor		8 Koridor		-	-	8 Koridor		8 Koridor		266.67 %	
2.15.02.2.09.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			32,542,203			50.743.531		176.547		1.023.000		-	-	1.199.546		1.199.546		3,69%	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	N/A		N/A		2 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		-	-	1 Laporan		1 Laporan		N/A	
2.15.02.2.09.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			32,491,043			54.529.421		11.430.127		23.331.124		-	-	34.761.251		34.761.251		106,99%	
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	N/A		N/A		72 Unit		88 Unit		92 Unit		-	-	92 Unit		92 Unit		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
				Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia																				
2.15.02.2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				5,090,782				3,364,931		202,868		740,349	-	-		943,218		943,218		18.53%		
				Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		0 Jaringan		0 Jaringan		-	-	0 Jaringan		1 Jaringan		100.00 %			
2.15.02.2.11.0001			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5,090,782				3.364.931		202.868		740.349	-	-		943.218		943.218		18,53%		
				Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A		N/A		10 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		-	-	3 Dokumen		3 Dokumen		N/A			
2.15.03		Program Pengelolaan Pelayaran				3,518,992		855,852		2,669,837		90,992		340,555	-	-		431,547		1,287,399		36,58%		
				Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-	-	0.00 %		0.00 %		0.00%			
2.15.03.2.04			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			3,518,992				2,669,837		90,992		340,555	-	-		431,547		431,547		12.26%		
				Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-	0 Kali		2 Kali		100.00 %			
2.15.03.2.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			3,518,992				2.669.837		90.992		340.555	-	-		431.547		431.547		12,26%		
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		N/A		2 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		-	-	0 Laporan		0 Laporan		N/A			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
2.15.05		Program Pengelolaan Perkeretaapian				5,874,008		4,446,226		5,274,312		796,460		1,955,391	-	-		2,751,850		7,198,076		122,54%		
				Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-	-		0.00 %		0.00 %		0.00%		
2.15.05.2.01			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			5,874,008				5,274,312		796,460		1,955,391	-	-		2,751,850		2,751,850		46.85%		
				Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0 Kali		-	-		0 Kali		2 Kali		100.00 %		
2.15.05.2.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			5,874,008				5,274,312		796,460		1,955,391	-	-		2,751,850		2,751,850		46,85%		
				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	N/A		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-	-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2024 mengacu pada RKPD Perubahan Kota Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan dan sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dirumuskan dalam 4 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, dan Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebanyak 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2024 tetap akan melaksanakan 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang selengkapny dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mengalami perubahan anggaran

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan BBM yang mengalami kenaikan harga serta penyesuaian kebutuhan lainnya

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan tenaga operasional pendukung pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Perhubungan

d. Peningkatan Pelayanan BLUD.

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum.

2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan pemasangan PJU.

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu, cermin tikungan, dsb.

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan pemeliharaan PJU

4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan pemeliharaan perlengkapan jalan seperti marka, pita pengkaduh, dan kebutuhan pemeliharaan SITS Bratang

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.

1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal.

Sub kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional Terminal di 14 lokasi.

c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional penyelenggaraan parkir.

d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional penyelenggaraan BBM yang mengalami kenaikan harga serta pengadaan Reader SAM dan Reader RFID Printer Smartcard untuk hasil pengujian kendaraan bermotor

e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan operasional angkutan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan serta penyesuaian kegiatan Abdi Yasa Teladan menjadi sosialisasi keselamatan kepada pengemudi angkutan umum.

g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan penyusunan dokumen sesuai dengan prioritas kebutuhan.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional pengawasan keselamatan transportasi perairan.

4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian.

1) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian.

Sub kegiatan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional pengawasan keselamatan perlintasan sebidang.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perhubungan
Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92 %	81,234,345,313	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92 %	81,169,777,713	
	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	55,876,664,422	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	58,960,055,514	
	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/bulan	55,876,664,422	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	58,960,055,514	
	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	6,729,789,704	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	4,490,599,399	
	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	6,729,789,704	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	4,490,599,399	
	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100 %	9,210,268,343	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100 %	8,790,056,169	
	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9,210,268,343	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8,790,056,169	
	2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Laporan	9,417,622,844	2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Laporan	8,929,066,631	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Parkir Tepi Jalan Umum					Parkir Tepi Jalan Umum			
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan				Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan		
	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,684,000,000	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,684,000,000	
	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,733,622,844	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,245,066,631	
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/ jam	472,395,994,400	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/ jam	488,701,850,320	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %		
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80 %				Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80 %		
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional	80 %				Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional	80 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya					Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya			
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	274,112,494,091	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	261,953,100,130	
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi				Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	9 Lokasi		
	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	99,845,241,975	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7.500 Unit	97,829,081,828	
	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	11,711,174,722	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	5,126,246,163	
	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	99252 Unit	135,319,097,069	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105.846 Unit	138,209,443,129	
	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	27,236,980,325	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	20,788,329,010	
	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	19,087,306,554	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	51,993,491,099	
	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	19,087,306,554	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	51,993,491,099	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	25,249,470,994	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	27,842,935,135	
	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	25,249,470,994	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	27,842,935,135	
	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit	9,717,776,860	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit	9,930,416,360	
	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	9,717,776,860	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	9,930,416,360	
	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis	35,591,062,903	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis	36,191,055,436	
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi				Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		
	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	12 Laporan	32,044,292,582	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	12 Laporan	32,771,773,726	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota		Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota			Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota		Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota			
	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	13 Laporan	3,546,770,321	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	13 Laporan	3,419,281,710	
	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	105,272,952,059	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	8 Koridor	98,981,626,442	
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang				Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		
	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	50,743,530,587	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	32,881,191,861	
	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	72 Unit	54,529,421,472	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	92 Unit	66,100,434,581	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten/Kota yang Tersedia			Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	3,364,930,939	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	1,809,225,718	
	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	3,364,930,939	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1,809,225,718	
3	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100 %	2,669,837,211	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100 %	1,471,201,864	
	2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	2,669,837,211	2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	1,471,201,864	
	2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2,669,837,211	2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,471,201,864	
4	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase Penyelenggaraan	100 %	5,274,311,892	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase Penyelenggaraan	100 %	5,510,458,708	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PERKERETAAPIAN		Keselamatan Perkeretaapian			PERKERETAAPIAN		Keselamatan Perkeretaapian			
	2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	5,274,311,892	2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	5,510,458,708	
	2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,274,311,892	2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,510,458,708	

Dalam tabel 3.1 rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 belum terdapat kegiatan maupun sub kegiatan yang mengalami perubahan output maupun anggaran. Sub Kegiatan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran semula Rp 55.876.664.422,00 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 58.960.055.514,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan. Terkait dengan target output Sub Kegiatan mengalami perubahan yang semula 272 Orang Bulan menjadi 258 Orang Bulan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran semula Rp. 6.729.789.704,00 yang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 4.490.599.399, dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan operasional Dinas Perhubungan. Terkait dengan target output Sub Kegiatan mengalami perubahan yang semula 23 Paket menjadi 13 Paket dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran semula Rp. 9.210.268.343,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 8.790.056.169,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk :
 - a. Pembayaran rekening listrik, air dan telepon;
 - b. Pembayaran honorarium narasumber; dan
 - c. Pembayaran honorarium tenaga operasionalTerkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
4. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD alokasi anggaran semula dan menjadi sebesar Rp. 6.684.000.000,00 dengan asumsi belum ada kebutuhan untuk penyesuaian anggaran untuk perbaikan armada angkutan umum perkotaan. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
5. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD alokasi anggaran semula Rp. 2.733.622.844,00 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.245.066.631,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk penyelenggaraan perparkiran. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.

6. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota alokasi anggaran semula Rp. 99.845.241.975,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 97.829.081.828,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan prasarana pendukung transportasi yang ditunda pelaksanaannya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan mengalami perubahan yang semula 3.000 Unit menjadi 7.500 Unit dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota alokasi anggaran semula Rp. 11.711.174.722,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 5.126.246.163,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan prasarana pendukung transportasi yang ditunda pelaksanaannya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan karena masih menghitung realisasi pelaksanaan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
8. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan alokasi anggaran semula Rp. 135.319.097.069,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 138.209.443.129,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan prasarana pendukung transportasi yang ditunda pelaksanaannya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan mengalami perubahan yang semula 99.252 Unit menjadi 105.846 Unit karena Pemasangan PJU sampai akhir tahun 2023 sangat banyak dan berjumlah 105.846 Unit.
9. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan alokasi anggaran semula Rp. 27.236.980.325,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 20.788.329.010,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan perlengkapan jalan yang ditunda pelaksanaannya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun
10. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) alokasi anggaran semula Rp. 19.087.306.554,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 51.993.491.099,00 dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pembangunan terowongan bawah tanah dari Terminal Intermoda Joyoboyo menuju Kebun Binatang Surabaya untuk memberikan kenyamanan pengunjung untuk menyeberang jalan. Terkait dengan target output Sub Kegiatan mengalami perubahan yang semula 12 Unit menjadi 14 Unit karena jumlah terminal tipe C yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sampai saat ini berjumlah 14 Lokasi.

11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 25.249.470.994,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 27.842.935.135,00 dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga operasional selama 2 bulan untuk membantu penyelenggaraan manajemen perparkiran di Kota Surabaya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
12. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor alokasi anggaran semula Rp. 9.717.776.860,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 9,930,416,360,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan tenaga operasional penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Wiyung dan Tandes selama 2 bulan. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
13. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 3.546.770.321,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 3.419.281.710,00 dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga operasional selama 2 bulan untuk penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Surabaya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
14. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 32.044.292.582,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 32.771.773.726,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan kegiatan patrol lalu lintas dan angkutan jalan Kota Surabaya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
15. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 54.529.421.472,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 66.100.434.581,00 dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga operasional dan BBM selama 2 bulan untuk membantu penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Surabaya

(Suroboyo Bus, Feeder Wira - Wiri, dan Bus Sekolah). Terkait dengan target output Sub Kegiatan mengalami perubahan yang semula 72 Unit menjadi 92 Unit dikarenakan terkait jumlah armada yang akan diselenggarakan sampai dengan saat ini berjumlah 28 unit Suroboyo Bus, 56 unit Feeder Wira – Wiri, dan 8 unit Bus Sekolah..

16. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 50.743.530.587,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 32.881.191.861,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dengan skema *Buy The Service* (BTS). Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
17. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 3.364.930.939,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.809.225.718,00 dikarenakan adanya penundaan dokumen perencanaan jaringan transportasi umum. Terkait dengan target output Sub Kegiatan mengalami perubahan yang semula 10 Dokumen menjadi 6 Dokumen karena terdapat dokumen perencanaan jaringan transportasi umum Kota Surabaya yang mengalami penundaan.
18. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau alokasi anggaran semula Rp. 2.669.837.211,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.471.201.864,00 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan pengamanan perlintasan sebidang di Kota Surabaya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.
19. Sub Kegiatan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian alokasi anggaran semula Rp 5.274.311.892,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 5.510,458.708 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan peningkatan kesadaran atas keamanan dalam menjalankan transportasi perkeretaapian di Kota Surabaya. Terkait dengan target output Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan dan diupayakan dapat tercapai di akhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 08 AUG 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Surabaya



Tundjung Iswandaru, ST, MM
Pembina Tk.I / IV b
196904071991031009